



SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan instansi masing-masing;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026 sudah tidak sesuai;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3.Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Daerah...

10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0425);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tangerang.
7. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.
8. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

9. Indikator Kinerja...

9. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi

BAB II INDEKS KINERJA UTAMA Pasal 2

Tujuan penetapan IKU:

- a. untuk memperoleh informasi Kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen Kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas Kinerja.

Pasal 3

IKU di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. IKU Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- b. IKU Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 4

- (1) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan acuan dalam:
 - a. menetapkan rencana Kinerja tahunan;
 - b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
 - c. menyusun laporan akuntabilitas Kinerja; dan
 - d. melakukan evaluasi pencapaian Kinerja, sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan acuan ukuran Kinerja yang digunakan oleh setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah melakukan analisis dan evaluasi Kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran Kinerja, perbaikan Kinerja, dan peningkatan akuntabilitas Kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan, maupun informasi lainnya.
- (3) Penyusunan laporan akuntabilitas Kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian Kinerja dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah serta disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III...

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi.
- (2) Dalam hal IKU menimbulkan dampak negatif terhadap Kinerja Perangkat Daerah secara keseluruhan, Kepala Perangkat Daerah melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah agar ditentukan pengembangan lebih lanjut.

Pasal 8

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Inspektorat.
- (2) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan IKU, Inspektorat mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan monitoring dan evaluasi ekuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah; dan
 - b. memantau kemajuan pencapaian Kinerja.
- (3) Hasil penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan sebagai dasar perbaikan dan penerapan manajemen Kinerja pada Perangkat Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 75), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10...

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 6 November 2025

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

MOCHAMMAD MAESYAL RASYID

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 6 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

SOMA ATMAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025 NOMOR 55

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ABDULLAH RIJAL, S.H., M.Si.
NIP. 19750813 200801 1 006

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2029

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Sumber Data	Formulasi (Rumus)	Penanggung Jawab Data	Unit Penanggung Jawab
TUJUAN DAERAH							
1	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) adalah ukuran yang menggambarkan tingkat kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah melalui penilaian terhadap 2 dimensi utama, yaitu RB General dan RB Tematik. Dimensi RB General terdiri dari dua (2) komponen yaitu komponencapaian strategi pelaksanaan RB General dan komponen capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi. Terdapat dua komponen dalam Evaluasi RB Tematik pemerintah daerah, yaitu komponen strategi pelaksanaan RB Tematik dan komponen capaian dampak tema terkait.	Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan oleh KemenPAN RB	$IRB = \Sigma$ (Skor Indeks Indikator Penilaian RB)	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	Perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDB/PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa	Nilai laju pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tangerang didapat dari hasil publikasi Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (persen) oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Banten	$LPE = ((PDRB \text{ tahun } n - PDRB \text{ tahun } n-1) / PDRB \text{ tahun } n-1) \times 100\%$	Badan Pusat Statistik	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Tingkat Inflasi	%	Kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu dalam wilayah provinsi tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi.	Data BPS Tingkat Inflasi Kota Tangerang Y-on-Y	$Inflasi = \frac{IHK_t - IHK_{(t-1)}}{IHK_{(t-1)}} \times 100\%$ Dimana: $IHK_t\$ =$ Indeks Harga Konsumen Tahun t $IHK_{(t-1)}\$ =$ Indeks Harga Konsumen Tahun sebelumnya (t-1)	Badan Pusat Statistik	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Sumber Data	Formulasi (Rumus)	Penanggung Jawab Data	Unit Penanggung Jawab												
4	Tingkat Kemiskinan	%	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM)	Publikasi oleh Badan Pusat Statistik	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ Dimana: - α=0 - z = garis kemiskinan. - yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i=1,2,3,...,q), yi <z - q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. - n = jumlah penduduk. didapat dari hasilSurvei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah												
5	Usia Harapan Hidup	tahun	UHH adalah rata-rata perkiraan lamanya seseorang dapat bertahan hidup sejak lahir, dengan asumsi kondisi kesehatan saat ini akan terus berlanjut. Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur kualitas kesehatan masyarakat di suatu wilayah. UHH mencerminkan rata-rata jumlah tahun hidup yang diharapkan oleh seseorang sejak lahir, dengan asumsi bahwa kondisi kesehatan saat ini akan terus berlanjut sepanjang hidupnya. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan UHH sebagai salah satu komponen utama dalam mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bersama dengan indikator pendidikan dan ekonomi.	Publikasi BPS Usia Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten	UHH dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun. Jika catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack .	Badan Pusat Statistik	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah												
6	Indeks Pendidikan	indeks	Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dari dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (mean years of schooling), dan harapan lama sekolah (expected years of schooling). Pada proses pementukan IPM, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah diberi bobot yang sama, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM.	Buku Profil Dinas Pendidikan	$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$I_{Pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ <table><tr><th>Komponen</th><th>Harapan Lama Sekolah (HLS)</th><th>Rata-rata Lama Sekolah (RLS)</th></tr><tr><td>Satuan</td><td>Tahun</td><td>Tahun</td></tr><tr><td>Min</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Max</td><td>18</td><td>15</td></tr></table>	Komponen	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Satuan	Tahun	Tahun	Min	0	0	Max	18	15	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Komponen	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)																	
Satuan	Tahun	Tahun																	
Min	0	0																	
Max	18	15																	
7	Indeks Harmoni	indeks	Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) merupakan alat ukur yang dikembangkan untuk memahami, memantau, dan meningkatkan harmoni sosial di berbagai wilayah Indonesia dengan mengukur 4 dimensi yaitu ekonomi, sosial, budaya dan keberagamaan. Adapun IHaI mencakup 5 tujuan diantaranya: 1. Sosialisasi dan Edukasi 2. Potret dan Pemetaan Skor PPA 3. Menggali Data Usul Saran dan Kritik 4. Mendapatkan Evidence dan 5. Menyajikan Saran dan Rekomendasi.	Laporan Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) Direktorat Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri	IHaI=Σ(ki Xi) Mencerminkan pengukuran Indeks Harmoni Indonesia dengan menggabungkan variabel-variabel (X i) dan bobot (k i) masing-masing. Formula ini memperlihatkan pendekatan agregatif di mana nilai setiap variabel dikalikan dengan bobotnya, dan kemudian dijumlahkan untuk menghasilkan nilai akhir Indeks Harmoni Indonesia. Dalam konteks rumus ini: 1. IHaI: Nilai akhir dari Indeks Harmoni. 2. Σ: Simbol sigma yang menunjukkan operasi penjumlahan. 3. k i : Bobot yang diberikan pada setiap variabel X i 4. X i : Variabel-operasional yang mencerminkan aspek tertentu dari kondisi harmoni.	KEMENDAGRI	KESBANGPOL												

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Sumber Data	Formulasi (Rumus)	Penanggung Jawab Data	Unit Penanggung Jawab
8	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	indeks	digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah atau penyedia layanan publik lainnya. Infrastruktur yang dimaksud di sini meliputi berbagai sektor, seperti transportasi, energi, air bersih, saluran pembuangan, telekomunikasi, perumahan, jalan, dan jembatan.	Laporan akhir Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Tangerang	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur adalah nilai rata-rata tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur yang diperoleh melalui survei kuesioner di 29 kecamatan,	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
9	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) adalah perbandingan antara emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer terhadap produk domestik regional bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut. Penurunan intensitas emisi GRK untuk memperlihatkan 50 sinergitas antara upaya penurunan emisi dengan pertumbuhan ekonomi	Laporan Penurunan Intensitas Emisi GRK di DLHK Kabupaten Tangerang	%PEt = PEt/EBt 1. %PE t = persentase penurunan emisi GRK total sektoral daerah pada tahun t 2. PE t = penurunan emisi GRK total sektoral tahun t 3. EB t = emisi GRK total sektoral baseline tahun t 4. t = titik tahun perhitungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
10	Indeks Ketahanan Pangan	indeks	Ukuran dari beberapa indikator (Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih, Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan,Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran, Persentase rumah tangga tanpa akses listrik, Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun,Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk, Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting). Angka harapan hidup pada saat lahir) yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah (kab/kota). Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah (kabupaten/kota).	Publikasi Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten/Kota Update oleh Badan Pangan Nasional	1. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan z-score dan <i>distance to scale</i> (0–100) 2. Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus: $Y(j) = \sum_{i=1}^n a_i X_{ij}$ Dimana: <i>i</i> : Indikator ke-1, 2, 3, ... 7, 8, dan 9 <i>a_i</i> : Bobot masing-masing indikator ke- <i>i</i> <i>j</i> : Kabupaten ke-1, 2, 3, ... 414, 415, dan 416; kota ke-1, 2, 3, ... 96, 97, dan 98 <i>X_{ij}</i> : Nilai standarisasi masing-masing indikator ke- <i>i</i> pada kabupaten/kota ke- <i>j</i> <i>Y_j</i> : Indeks Ketahanan Pangan kabupaten/kota ke- <i>j</i> Wilayah yang memiliki nilai IKP paling besar merupakan wilayah yang paling tahan pangan, sebaliknya nilai IKP paling kecil menunjukkan wilayah yang rentan terhadap kerawanan pangan.	Badan Pangan Nasional	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
SASARAN DAERAH							
11	Indeks Pelayanan Publik	indeks	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.	Laporan hasil evaluasi pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Tangerang yang diterbitkan oleh KemenPAN RB	Penilaian kinerja di tingkat UPP dilakukan dengan menggunakan desk evaluation, pengisian kuesioner, observasi dan wawancara. Pengisian kuesioner menggunakan 3 (tiga) jenis kuesioner yang akan divalidasi menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk memperoleh data yang objektif dan akuntabel. Formulir 01 diperuntukkan dan diisi oleh unit penyelenggara pelayanan yang menjadi lokus penilaian, formulir 02 diisi oleh evaluator berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, formulir 03 diisi oleh pengguna layanan berdasarkan pengalaman yang bersangkutan dalam menerima pelayanan. Nilai IPP merupakan nilai komposit dari 3 formulir.	KEMENPAN RB	Sekretariat Daerah

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Sumber Data	Formulasi (Rumus)	Penanggung Jawab Data	Unit Penanggung Jawab
12	Indeks PEMDI	indeks	Indeks Pemerintah Digital untuk mengukur kinerja transformasi digital di instansi pemerintah Indonesia. Indeks ini untuk mengevaluasi kesiapan dan kualitas tata kelola, layanan, dan infrastruktur digital di pemerintahan.	Laporan Hasil Perhitungan Indeks PEMDI oleh Diskominfo	Indeks PEMDI = Σ (Skor Indeks Indikator Penilaian PEMDI)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
13	Indeks Professionalitas ASN	indeks	Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.	Laporan Hasil Pengukuran IPA yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).	IP ASN = Σ (Skor Indeks Indikator Penilaian IP ASN) IP ASN diperoleh melalui evaluasi yang dilakukan Kepegawaian Negara (BKN) berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Evaluasi IP ASN meliputi 4 (empat) dimensi dengan bobot yaitu: Kualifikasi (25%), Kompetensi (40%), Kinerja (30%), dan Disiplin (5%). Nilai IP ASN didapat dari penjumlahan nilai tiap dimensi yang telah dikalikan dengan bobot masing-masing.	Badan Kepegawaian Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
14	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	indeks	Satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu.	Lapora dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri	Formulasi perhitungan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dilakukan dengan menilai enam dimensi utama yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (bobot 15), pengalokasian anggaran dalam APBD (20), transparansi pengelolaan keuangan daerah (15), penyerapan anggaran (20), kondisi keuangan daerah (15), dan opini BPK atas LKPD (15). Setiap indikator pada dimensi dihitung melalui normalisasi nilai atau pemberian skor biner (1 jika memenuhi, 0 jika tidak), kemudian dirata-ratakan untuk memperoleh skor dimensi, lalu dikalikan dengan bobot dimensi. Hasil dari semua dimensi dijumlahkan sehingga menghasilkan nilai IPKD dalam rentang 0–100 yang mencerminkan kualitas tata kelola keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.	Kementerian Dalam Negeri	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
15	Nilai AKIP	nilai	predikat atau tingkatan kinerja yang menunjukkan seberapa baik sebuah instansi pemerintah dalam mengelola dan bertanggungjawabkan kinerjanya. Nilai ini diukur melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mencakup aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja.	Laporan Hasil Evaluasi AKIP yang dikeluarkan oleh KemenPAN RB	$\text{Nilai AKIP} = \sum_{i=1}^5 (\text{Bobot Komponen}_i \times \text{Nilai Komponen}_i)$ Hasil Evaluasi AKIP dihitung dengan menjumlahkan angka hasil pembobotan dari 4 komponen SAKIP yaitu, Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Internal.	KEMENPAN RB	Sekretariat Daerah
16	Maturitas SPIP	nilai	adalah tingkat kematangan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diintegrasikan dengan manajemen risiko, pengendalian intern atas pelaporan keuangan, serta pengawasan intern, yang diukur berdasarkan hasil penilaian oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan skala level 1 (Paling Rendah) sampai dengan level 5 (Optimal).	LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI PADA PMERINTAH KABUPATEN TANGERANG OLEH BPKP	$\text{Skor Maturitas SPIP} = \sum_{i=1}^5 (\text{Bobot Unsur}_i \times \text{Skor Unsur}_i)$ Capaian indikator Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi diperoleh melalui proses evaluasi yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Proses penilaian dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang telah diintegrasikan dengan manajemen risiko, pengendalian intern atas pelaporan keuangan, dan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah.	BPKP BANTEN	Inspektorat Kabupaten
17	Indeks Elektonifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Indeks	merupakan instrumen untuk memetakan, memonitor perkembangan elektronifikasi transaksi Pemda dan mengukur perbandingan elektronifikasi transaksi Pemda di suatu daerah relatif terhadap daerah lainnya	Hasil Skoring Indeks ETPD yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia	$\text{IETPD} = \sum_{i=1}^3 (\text{Bobot Aspek}_i \times \text{Skor Aspek}_i)$ I-ETPD = (Skor Implementasi × 70%) + (Skor Realisasi × 10%) + (Skor Lingkungan Strategis × 20%)	Bank Indonesia	Badan Pendapatan Daerah

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Sumber Data	Formulasi (Rumus)	Penanggung Jawab Data	Unit Penanggung Jawab
18	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB/PDB adalah persentase nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Produk Domestik Bruto (PDB) pada periode tertentu.	publikasi Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tangerang (persen) oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang	Kontribusi Industri Pengolahan=PDRB Sektor Industri Pengolahan/Total PDRB × 100%	Badan Pusat Statistik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
19	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB/PDB adalah persentase nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh sektor perdagangan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Produk Domestik Bruto (PDB) pada periode tertentu.	publikasi Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tangerang (persen) oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang	Kontribusi Perdagangan= (PDRB Sektor Perdagangan)/Total PDRB x 100%	Badan Pusat Statistik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
20	Kontribusi sektor pertanian. kehutanan. dan perikanan terhadap PDRB	%	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB/PDB adalah persentase nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Produk Domestik Bruto (PDB) pada periode tertentu.	publikasi Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tangerang (persen) oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang	Kontribusi Perdagangan= (PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan)/Total PDRB x 100%	Badan Pusat Statistik	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Perikanan
21	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku	%	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB/PDB adalah persentase nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh sektor pariwisata menggunakan pendekatan penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Produk Domestik Bruto (PDB) pada periode tertentu.	publikasi Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tangerang (persen) oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang	Kontribusi Sektor Pariwisata =_(PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)/Total PDRB x 100%	Badan Pusat Statistik	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
22	Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB	%	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap total PRDB	Publikasi BPS	Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB = PMTB / PDRB ADHK x 100%	Badan Pusat Statistik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Sumber Data	Formulasi (Rumus)	Penanggung Jawab Data	Unit Penanggung Jawab
23	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah1 . Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun	Laporan Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB di Diskum	Volume Usaha Koperasi / PDRB Kab. Tangerang x 100%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
24	Indeks Perkembangan Harga	%	Indeks Perkembangan Harga (IPH) adalah ukuran statistik yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menunjukkan perubahan harga dari 20 komoditas pangan penting yang memiliki bobot besar dalam Indeks Harga Konsumen (IHK).	Laporan Hasil survey harga 20 komoditas pangan oleh BPS	Indeks Perkembangan Harga (Indeks) = (Total Harga Saat Ini / Total Harga Dasar) x 100%	Badan Pusat Statistik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
25	Indeks Desa	Indeks	Indeks Desa adalah sebuah indikator tunggal dan komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan dan kemandirian desa secara menyeluruh, yang terdiri dari tiga dimensi utama: Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekonomi, dan Ketahanan Ekologi/Lingkungan	Laporan Peringkat Indeks Desa Membangun yang di publikasikan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Y= Total Skor X/Nilai Maksimum Skor Indeks Desa $Y = \frac{\text{Total Skor } X}{\text{Nilai maksimum Skor Indeks Desa}}$ Keterangan: Y = Komponen Indeks yang terdiri dari Indeks Dimensi Layanan dasar,total indeks Dimensi Sosial, total indeks Dimensi Ekonomi, total indeks Dimensi lingkungan, total indeks Dimensi aksesibilitas, dan total indeks Dimensi tata kelola pemerintahan Desa X = Indikator X	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
26	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk dalam angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja. TPAK menunjukkan seberapa besar proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah.	Publikasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja oleh Badan Pusat Statistik	TPAK= b / a × 100% Keterangan: a: Jumlah angkatan kerja b: Jumlah penduduk 15 tahun ke atas	Badan Pusat Statistik	Dinas Tenaga Kerja
27	Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS)	indeks	Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan sosial masyarakat berdasarkan berbagai aspek kehidupan sosial. IKS dibangun dari aspek-aspek kesejahteraan sosial yang mencakup dimensi-dimensi utama seperti: Ketahanan Keluarga, Ketersediaan dan Akses terhadap Pelayanan Sosial, Partisipasi Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Perumahan Layak, Perlindungan Sosial, Pekerjaan dan Pendapatan, dan Lingkungan Sosial. Setiap dimensi diukur menggunakan beberapa indikator, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, dan dinilai dengan menggunakan skala tertentu	Laporan Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) oleh Kemensos	Nilai IKESOS Kabupaten/Kota dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari Nilai Dimensi. Nilai Penimbang atau Bobot dihitung berdasarkan Analytical Hierarchy $IKESOS_{Kabupaten/Kota} = \sum_{i=1}^3 (Dimensi_i \times Bobot_{Dimensi\ i}) = (Dimensi_1 \times Bobot_1$	Kementrian Sosial	Dinas Sosial

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Sumber Data	Formulasi (Rumus)	Penanggung Jawab Data	Unit Penanggung Jawab
28	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	indeks	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.	Publikasi Indeks Ketimpangan Gender oleh Badan Pusat Statistik	$IKG = \frac{1}{3}(I_{Kesehatan} + I_{Pemberdayaan} + I_{PasarTenagaKerja})$ Dimana: 1. IKesehatan adalah indeks ketimpangan pada dimensi kesehatan. 2. IPemberdayaan adalah indeks ketimpangan pada dimensi pemberdayaan. 3. IpasarTenagaKerja adalah indeks ketimpangan pada dimensi pasar tenaga kerja.	Badan Pusat Statistik	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
29	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	Proporsi jumlah penerima pemeriksaan gratis pada semua kelompok usia terhadap jumlah penduduk	Buku Profil Dinas Kesehatan	Jumlah penduduk Kabupaten Tangerang penerima pemeriksaan gratis dibagi jumlah penduduk Kabupaten Tangerang dalam periode satu tahun dikali 100	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
30	Prevalensi Stunting	%	Stunting (pendek/ sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010. a. Sangat pendek: Zscore & -3,0 b. Pendek: Zscore ? -3,0 s/d Zscore & -2,0	hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)	Prevelensi stunting dihitung melalui metode two stage stratified sampling secara potong lintang (Cross-Sectional)	Kementrian Kesehatan	Dinas Kesehatan
31	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	Cakupan Program nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berupa jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah	Laporan Profil Dinas Kesehatan	Jumlah penduduk Kabupaten Tangerang yang telah terdaftar sebagai peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional dibagi jumlah penduduk Kabupaten Tangerang dalam satu periode satu tahun dikali 100	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Sumber Data	Formulasi (Rumus)	Penanggung Jawab Data	Unit Penanggung Jawab
32	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	indeks	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga yang dibentuk dari 17 variabel serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: a. iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40. b. iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40-70. c. iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.	Laporan Profil DPPKB	Tentu, berikut adalah transkripsi dari gambar yang Anda berikan: Indeks Ketentraman= $\frac{\text{Maks Skor Ketentraman}-\text{Min Skor Ketentraman}}{100} \times$ Skor Total Ketentraman-Min Skor Ketentraman Indeks Kemandirian= $\frac{\text{Maks Skor Kemandirian}-\text{Min Skor Kemandirian}}{\text{Skor Total Kemandirian-Min Skor Kemandirian}} \times 100$ Indeks Kebahagiaan= $\frac{\text{Maks Skor Kebahagiaan}-\text{Min Skor Kebahagiaan}}{\text{Skor Total Kebahagiaan-Min Skor Kebahagiaan}} \times 100$ Keterangan: Maksimal skor dan minimal skor adalah nilai skor maksimum dan minimal yang mungkin terjadi pada setiap dimensi iBangga= $\frac{\text{Indeks Ketentraman}+\text{Indeks Kemandirian}+\text{Indeks Kebahagiaan}}{3}$	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
33	Rata Rata Lama Sekolah	tahun	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal	Publikasi Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Tahun) oleh BPS Banten	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas Xi = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas	Badan Pusat Statistik	Dinas Pendidikan
34	Harapan lama sekolah (tahun)	tahun	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.	Publikasi Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Tahun) oleh BPS Banten	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t FK = Faktor Koreksi Pesantren E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t i = Usia (a, a + 1, ..., n)	Badan Pusat Statistik	Dinas Pendidikan
35	Indeks Pembangunan Pemuda	indeks	indeks komposit yang mengukur capaian pembangunan pemuda berdasarkan 16 indikator yang dikelompokkan dalam lima domain: Pendidikan dan Pelatihan, Kesehatan, Ketenagakerjaan Layak, Partisipasi dan Kepemimpinan, serta Inklusivitas dan Kesetaraan Gender	Hasil Laporan Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Tangerang 2024	$IPP = \frac{\text{Indeks Domain 1} + \text{Indeks domain 2} + \dots + \text{Indeks Domain 5}}{5}$	Bidang Penelitian dan pembangunan Bappeda	Bidang Penelitian dan pembangunan Bappeda / Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
36	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	indeks	Instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan, diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi (2) dimensi (3) dimensi ketahanan sosial (4) dimensi warisan (5) dimensi ekspresi (6) dimensi budaya dan (7) dimensi kesetaraan gender. 7 dimensi tersebut diukur melalui 31 indikator	Laporan Kajian Indeks Pembangunan Kebudayaan	$IPK = \sum_{j=1}^7 (W_j * Indeks D_j)$ Keterangan: IPK adalah Indeks Pembangunan Kebudayaan D_j adalah dimensi ke-j W_j adalah bobot dimensi ke-j	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Sumber Data	Formulasi (Rumus)	Penanggung Jawab Data	Unit Penanggung Jawab
37	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	Mengukur indeks pembangunan literasi masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Provinsi dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat, yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM).	Laporan Profil Disperpusip	$\sum_i \frac{UPLM_i}{AM} \times 100$ Keterangan: UPLMi : variabel komponen pembentuk indeks dari Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat. AM : jumlah populasi sesuai segmentasi berdasarkan lokus/jenis deroustakaan.	Perpustakaan Nasional	Dinas Perpustakaan dan Arsip
38	Indeks Karakter Masyarakat	indeks	Indeks Karakter masyarakat adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai karakter masyarakat yang didasarkan pada dimensi religiustas, nasionalisme, kemandirian, dan gotong royong	Laporan kajian Indeks karakter masyarakat	Jumlah skor indeks dimensi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
39	Indeks Infrastruktur	indeks	Indeks infrastruktur adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat perkembangan dan kualitas infrastruktur di suatu wilayah atau sektor tertentu. Indeks ini biasanya dihitung berdasarkan berbagai indikator yang mencerminkan ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, PJU, dan transportasi.	Laporan kajian Indeks Infrastruktur	samakan dengan laporan litbang bappeda https://drive.google.com/file/d/1TLvKg0i-PGfLDwDJuTJE9i6k4Iul7Hb7/view?usp=sharing	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dlnas Bina Marga dan Sumber Daya Air
40	Ketaatan Rencana Pembangunan terhadap RTRW	%	Ketaatan Rencana Pembangunan terhadap RTRW adalah tingkat kesesuaian dan kepatuhan kegiatan pemanfaatan ruang (termasuk program, proyek, atau perizinan pembangunan) terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku.	Laporan evaluasi RTRW DTRB	Luas Kesesuaian Pemanfaatan Ruang / Rencana Peruntukan dalam RTRW x 100%	Dinas Tata Ruang dan Bangunan	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
41	Persentase RTH	%	perbandingan antara luas area ruang terbuka hijau (baik yang bersifat publik maupun privat) dengan 20% total luas wilayah kota, yang dihitung dalam persen	Laporan DTRB	Luas RTH / (20% dari Kawasan Perkotaan terbangun) x 100%	Dinas Tata Ruang dan Bangunan	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
42	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah indikator komposit yang menggambarkan kondisi kualitas lingkungan suatu wilayah secara umum, dihitung berdasarkan tiga komponen utama yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL), masing-masing dengan bobot 0,376 untuk IKA, 0,405 untuk IKU, dan 0,219 untuk IKL.	Laporan Akhir IKLH Kab. Tangerang	IKLH = (0,376 X IKA) + (0,405 X IKU) + (0,219 X IKL)	Kementrian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Sumber Data	Formulasi (Rumus)	Penanggung Jawab Data	Unit Penanggung Jawab
43	Indeks Risiko Bencana (Indeks)	indeks	Indeks Risiko Bencana adalah ukuran tingkat risiko bencana di setiap kabupaten/kota di Indonesia yang dihitung berdasarkan jenis bahaya (hazard) yang dimiliki, termasuk kombinasi dari berbagai jenis bahaya (multi hazard), dan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori tingkat risiko: 1 untuk risiko rendah, 2 untuk risiko sedang, dan 3 untuk risiko tinggi.	PublikasiIndeks Risiko Bencana pada https://inarisk.bnbp.go.id/irbi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Risiko Bencana=Hazard × Capacity:Vulnerability Hazard diukur berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi, dan kekuatan (magnitudo) dari berbagai fenomena alam; Vulnerability dihitung dari parameter sosial budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan; sedangkan Capacity dinilai dari pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas pengurangan risiko bencana. Hasil pengukuran diklasifikasikan ke dalam tiga tingkat risiko: 1 (rendah), 2 (sedang), dan 3 (tinggi).	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
44	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	%	mengukur persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di seluruh Kabupaten Tangerang	Laporan Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakanan	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih = Jumlah Rumah Tangga Yang Akan Menggunakan Sumber Air Layak/Jumlah Total Rumah Tangga (1.107.551) baseline 2024 x 100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakanan, Bappeda	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakanan, Bappeda
45	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	Ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.	Publikasi BPS Mengenai Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	$PoU \equiv \int_{x < MDER} f(x) dx$ 1. f(x) = distribusi probabilitas konsumsi energi per kapita (biasanya diasumsikan distribusi log-normal) 2. MDER = Minimum Dietary Energy Requirement (kebutuhan energi minimum, berbeda per negara/kelompok umur/jenis kelamin)	Badan Pusat Statistik	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

BUPATI TANGERANG,

 Ttd.

 MOHAMMAD MAESYAL RASYID

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Sumber Data	Formulasi (Rumus)	Penanggung Jawab Data	Unit Penanggung Jawab
1	Indeks Pendidikan	Angka	salah satu komponen dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM/HDI) yang mencerminkan pencapaian di bidang pendidikan.	Buku Profil Dinas Pendidikan	$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	Ukuran yang menunjukkan berapa tahun rata-rata penduduk suatu wilayah telah menempuh pendidikan formal. RLS biasanya dihitung untuk penduduk berusia 25 tahun ke atas, karena diasumsikan bahwa pada usia tersebut, pendidikan formal seseorang telah selesai. RLS digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat dan kualitas pendidikan dalam suatu wilayah.	Publikasi Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Tahun) oleh BPS Banten	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas Xi = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas	Badan Pusat Statistik	Dinas Pendidikan
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang	Publikasi Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Tahun) oleh BPS Banten	$Harapan\ Lama\ Sekolah = FK \sum_{t=7}^n \frac{E_t^i}{P_t^i}$ Keterangan: FK = Faktor koreksi pesantren E_t^i = Jumlah penduduk usia i yang berkolah pada tahun t P_t^i = Jumlah penduduk usia i pada tahun t i = Usia (7, 8, ..., n)	Badan Pusat Statistik	Dinas Pendidikan
4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	%	Persentase penduduk dalam suatu wilayah (nasional, provinsi, kabupaten/kota, desa, atau RT/RW) yang telah terdaftar sebagai peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, baik sebagai peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) maupun non-PBI (mandiri, pekerja formal).	Buku Profil Dinas Kesehatan	Jumlah penduduk Kabupaten Tangerang yang telah terdaftar sebagai peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional dibagi jumlah penduduk Kabupaten Tangerang dalam satu periode satu tahun dikali 100	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
5	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	Persentase anak balita (usia 0–59 bulan) dalam suatu populasi atau wilayah tertentu yang mengalami stunting, yaitu memiliki panjang/tinggi badan menurut umur (PB/U atau TB/U) berada di bawah -2 standar deviasi (SD) dari standar pertumbuhan WHO	hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)	Prevelensi stunting dihitung melalui metode two stage stratified sampling secara potong lintang (Cross-Sectional)	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
6	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	%	Proporsi jumlah penerima pemeriksaan gratis pada semua kelompok usia terhadap jumlah penduduk	Laporan Profil Dinas Kesehatan	Jumlah penduduk Kabupaten Tangerang penerima pemeriksaan gratis dibagi jumlah penduduk Kabupaten Tangerang dalam periode satu tahun dikali 100	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
7	Persentase Penduduk Kabupaten Tangerang penerima pemeriksaan kesehatan gratis	%	Proporsi jumlah penduduk Kabupaten Tangerang penerima pemeriksaan gratis pada semua kelompok usia terhadap jumlah penduduk Kabupaten Tangerang dalam periode satu tahun	Laporan Profil Dinas Kesehatan	$\text{Persentase penduduk Kabupaten Tangerang penerima pemeriksaan kesehatan gratis} = \frac{\text{Proporsi jumlah penduduk Kabupaten Tangerang penerima pemeriksaan gratis}}{\text{jumlah penduduk Kabupaten Tangerang dalam periode satu tahun}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Sumber Data	Formulasi (Rumus)	Penanggung Jawab Data	Unit Penanggung Jawab
8	Jumlah Penemuan Kasus Tuberkulosis (TB)	Kasus	Jumlah kasus Tuberkulosis yang ditemukan dan dilaporkan dibandingkan dengan jumlah estimasi kasus TB yang seharusnya ditemukan dalam satu tahun di suatu wilayah.	Laporan Profil Dinas Kesehatan	$\text{Jumlah Penemuan Kasus Tuberkulosis (TB)} = \text{Jumlah kasus Tuberkulosis yang ditemukan dan dilaporkan}$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
9	Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk Kabupaten Tangerang	%	Persentase penduduk Kabupaten Tangerang yang telah terdaftar sebagai peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), baik melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun non-PBI (mandiri, pekerja, dan lainnya), terhadap total jumlah penduduk Kabupaten Tangerang dalam satu periode satu tahun	Laporan Profil Dinas Kesehatan	$\text{Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional} = \frac{\text{Persentase penduduk Kabupaten Tangerang yang telah terdaftar sebagai peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)}}{\text{jumlah penduduk Kabupaten Tangerang dalam satu periode satu tahun}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
10	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (TB)	%	Persentase pasien TB paru BTA positif (atau TB sensitif obat) yang menyelesaikan pengobatan secara lengkap dan/atau dinyatakan sembuh berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, dibandingkan dengan seluruh pasien TB yang memulai pengobatan pada periode satu tahun	Laporan Profil Dinas Kesehatan	$\text{Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (TB)} = \frac{\text{Persentase pasien TB paru BTA positif (atau TB sensitif obat) yang menyelesaikan pengobatan secara lengkap dan/atau dinyatakan sembuh}}{\text{seluruh pasien TB yang memulai pengobatan pada periode satu tahun}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
11	Jumlah Kematian Balita	Orang	jumlah anak usia 0 sampai dengan 59 bulan (kurang dari 5 tahun) yang meninggal dunia dalam periode waktu tertentu (biasanya per tahun), di wilayah tertentu.	Laporan Profil Dinas Kesehatan	$\text{Jumlah Kematian Balita} = \text{jumlah anak usia 0 sampai dengan 59 bulan (kurang dari 5 tahun) yang meninggal dunia dalam satu tahun}$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
12	Tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan	%	Persentase tingkat kepuasan pasien pengguna layanan kesehatan langsung terhadap pelayanan Puskesmas, RSUD dan fasilitas kesehatan pemerintah lainnya selama periode satu tahun	Laporan Profil Dinas Kesehatan	$\text{Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsut}}{\text{Total Unsut yang Terisi}} \times 25$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
13	Indeks Infrastruktur jaringan jalan dan irigasi	%	ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat perkembangan dan kualitas infrastruktur dasar Jaringan Jalan, SDA dan Drainase	Laporan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	Rata-rata infrastruktur Jaringan Jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap, infrastruktur SDA Dalam Kondisi baik dan infrastruktur Drainase dalam kondisi baik	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
14	infrastruktur SDA dalam kondisi baik (%)	%	Infrastruktur Sungai, Saluran Pembuang dan Daerah Irigasi (LSD) dalam kondisi Baik	Laporan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	Persentase infrastruktur sungai dan saluran pembuang dalam kondisi baik ditambah persentase luas Daerah Irigasi (LSD) dalam kondisi baik dibagi dua	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
15	infrastruktur Drainase dalam kondisi baik	%	Drainase jalan kabupaten yang sudah tertangani	Laporan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	Panjang drainase dalam kondisi baik dibagi total Panjang jalan Kabupaten (SK Jalan 2024)	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
16	Infrastruktur jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap	%	Data kondisi jalan kabupaten sesuai SK Jalan Nomor 600.1/Kep.899-Huk/2024 Tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Kabupaten yaitu Presentase kondisi jalan Baik dan Sedang (Mantap)	Laporan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang di bagi total panjang jalan kabupaten di kali 100 persen	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Sumber Data	Formulasi (Rumus)	Penanggung Jawab Data	Unit Penanggung Jawab
17	Ketaatan Rencana Pembangunan terhadap RTRW	%	Ketaatan Rencana Pembangunan terhadap RTRW adalah tingkat kesesuaian dan kepatuhan kegiatan pemanfaatan ruang (termasuk program, proyek, atau perizinan pembangunan) terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku.	Laporan evaluasi RTRW DTRB	Luas Kesesuaian Pemanfaatan Ruang / Rencana Peruntukan dalam RTRW x 100%	Dinas Tata Ruang dan Bangunan	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
18	Persentase RTH	%	perbandingan antara luas area ruang terbuka hijau (baik yang bersifat publik maupun privat) dengan 20% total luas wilayah kota, yang dihitung dalam persen	Laporan DTRB	Luas RTH / (20% dari Kawasan Perkotaan terbangun) x 100%	Dinas Tata Ruang dan Bangunan	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
19	Persentase Pemanfaatan PBG sesuai peruntukannya	%	proporsi jumlah persetujuan gedung (PBG) yang pemanfaatannya konsisten dan sesuai dengan fungsi serta peruntukan yang tercantum dalam PBG yang telah diterbitkan, terhadap total PBG yang berlaku dalam priode tertentu	Laporan DTRB	Jumlah Pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya / Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku x 100%	Dinas Tata Ruang dan Bangunan	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
20	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung Strategis Daerah yang berkualitas	%	tingkat termenuhinya kebutuhan akan bangunan gedung strategis daerah yang memiliki standar kualitas tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah	Laporan DTRB	Jumlah Bangunan Gedung Strategis Daerah yang dibangun / Jumlah kebutuhan bangunan Gedung Strategis Daerah x 100%	Dinas Tata Ruang dan Bangunan	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
21	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	%	perbandingan anatara jumlah lokasi atau area yang telah mendapatkan penataan bangunan dan lingkungan terhadap jumlah total lokasi atau area yang teridentifikasi membutuhkan penataan	Laporan DTRB	Jumlah Lokasi yang mendapatkan Penataan Bangunan dan Lingkungan / Jumlah Lokasi yang perlu mendapatkan Penataan Bangunan dan Lingkungan x 100%	Dinas Tata Ruang dan Bangunan	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
22	Persentase Pembinaan Badan Usaha Jasa Konstruksi	%	proporsi jumlah badan usaha jasa konstruksi (BUJK) yang telah mendapatkan program pembinaan dari dinas terkait terhadap total BUJK yang terdaftar dan perlu di Bina diwilayah tersebut	Laporan DTRB	Jumlah Badan Usaha Konstruksi yang Mendapatkan Pembinaan / Jumlah Badan Usaha Konstruksi yang perlu mendapatkan Pembinaan x 100%	Dinas Tata Ruang dan Bangunan	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
23	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap	Laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengukuran dengan 71 indikator dan 7 prioritas yang telah diseakati dalam mewujudkan kab/kota tangguh bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
24	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	nilai rata-rata capaian waktu tanggap sejak mulai diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap melakukan operasional pemadaman yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ataupun oleh relawan kebakaran atau komunitas masyarakat lainnya yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Pemerintah Daerah secara formal.	Laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah keseluruhan waktu response time dibagi dengan jumlah keseluruhan kejadian	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Sumber Data	Formulasi (Rumus)	Penanggung Jawab Data	Unit Penanggung Jawab
25	Rasio Luas Kawasan Permukiman, Perumahan dan Pemakaman yang layak	Rasio	perbandingan persentase luas permukiman layak huni terhadap total luas permukiman di suatu wilayah. Angka ini menunjukkan seberapa besar bagian dari keseluruhan wilayah permukiman yang memenuhi kriteria kelayakan huni, yang mencakup kelengkapan sarana prasarana permukiman, seperti air bersih, sanitasi, jalan dan rumah layak huni.	Laporan Dinas Perumahan dan Pemukiman dan Pemakaman	Jumlah luas Kawasan Permukiman layak didapat dari Jumlah Luas Permukiman yang ditangani ditambah Jumlah Luas Kawasan Layak tahun tersebut dibagi Jumlah Luas Permukiman Total	Dinas Perumahan dan Pemukiman dan Pemakaman	Dinas Perumahan dan Pemukiman dan Pemakaman
26	persentase permukiman kumuh	%	angka perbandingan antara luas area kawasan permukiman kumuh dengan total luas area permukiman Kabupaten Tangerang, yang diukur berdasarkan kriteria-kriteria khusus seperti kualitas hunian dan infrastruktur dasar yang tidak layak	Laporan Dinas Perumahan dan Pemukiman dan Pemakaman	Jumlah Luas Permukiman Kumuh / Jumlah Luas Permukiman Total x 100	Dinas Perumahan dan Pemukiman dan Pemakaman	Dinas Perumahan dan Pemukiman dan Pemakaman
27	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	%	mengukur persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di seluruh Kabupaten Tangerang	Laporan Dinas Perumahan dan Pemukiman dan Pemakaman	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih = Jumlah Rumah Tangga Yang Akan Menggunakan Sumber Air Layak/Jumlah Total Rumah Tangga (1.107.551) baseline 2024 x 100%	Dinas Perumahan dan Pemukiman dan Pemakaman	Dinas Perumahan dan Pemukiman dan Pemakaman
28	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Nilai	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi, sub-dimensi, dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola penyelenggaraan Trantibum yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu.	Laporan Satuan Polisi Pamong Praja	$I_{IPKKU} = \sum_{n=1}^i (WD^i \times WS_{\frac{i}{n}} \times S_{\frac{i}{n}})$ I_{IPKKU} = Nilai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) WD^i = Nilai bobot pada dimensi ke-I $WS_{\frac{i}{n}}$ = Nilai bobot pada subdimensi ke-n dimensi ke-i $S_{\frac{i}{n}}$ = Nilai rerata skala likert pada indikator di subdimensi ke-n dimensi ke-i	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
29	Persentase penanganan gangguan ketertiban umum, Ketenteraman masyarakat, dan pelanggaran Perda/Perkada yang ditangani	%	Persentase ini mengukur tingkat keberhasilan Satpol PP dalam menangani laporan/kejadian gangguan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan pelanggaran Perda/Perkada yang masuk dan ditindaklanjuti dalam kurun waktu tertentu.	Laporan Satuan Polisi Pamong Praja	$\text{Persentase Penanganan} = \frac{\text{Jumlah gangguan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan pelanggaran Perda/Perkada yang ditangani}}{\text{Jumlah gangguan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan pelanggaran Perda/Perkada yang dilaporkan}} \times 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
30	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	Indeks Kesejahteraan Sosial, Merupakan ukuran kesejahteraan sosial di Indonesia, Kesejahteraan sosial sendiri menurut Pasal 1 UU Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.	Laporan Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) oleh Kemensos	$IKESOS_{Kabupaten/Kota} = \sum_{i=1}^3 (\text{Dimensi}_i \times \text{Bobot}_{\text{Dimensi}_i}) = (\text{Dimensi}_1 \times \text{Bobot}_1 + \text{Dimensi}_2 \times \text{Bobot}_2 + \text{Dimensi}_3 \times \text{Bobot}_3)$	Kementrian Sosial	Dinas Sosial

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Sumber Data	Formulasi (Rumus)	Penanggung Jawab Data	Unit Penanggung Jawab
31	Persentase PPKS yang Berdaya	%	PPKS yang sudah memiliki kemampuan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasarnya. PPKS yang ditargetkan akan berdaya adalah PPKS dengan beberapa ketentuan, mulai Anak terlantar, Lansia Terlantar, Penyandang Disabilitas Terlantar, WRSE, Eks Napi dan Fakir Miskin Desil 1 s.d Desil 2.	Laporan Dinas Sosial	Persentase PPKS yang Berdaya = Jumlah PPKS yang Berdaya : Jumlah PPKS x 100%	Dinas Sosial	Dinas Sosial
32	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk dalam angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja. TPAK menunjukkan seberapa besar proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah.	Publikasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja oleh Badan Pusat Statistik	TPAK= b / a x 100% Keterangan: a: Jumlah angkatan kerja b: Jumlah penduduk 15 tahun ke atas	Badan Pusat Statistik	Dinas Tenaga Kerja
33	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan	%	Pengukuran indikator Meningkatnya Kesempatan Kerja	Laporan Dinas Tenaga Kerja	$\text{Persentase Tenaga Kerja} = \frac{\text{Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar}} \times 100$	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
34	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	Ukuran yang menunjukkan sejauh mana kehilangan pencapaian keberhasilan pembangunan dalam tiga dimensi utama (kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan partisipasi ekonomi) akibat adanya ketimpangan antara perempuan dan laki-laki, yang diukur dengan nilai indeks antara 0 hingga 1, dimana semakin tinggi nilai indeksnya, semakin timpang capaian pembangunan antara kedua jenis kelamin	Publikasi Indeks Ketimpangan Gender oleh Badan Pusat Statistik	Indeks komposit berdasarkan tiga dimensi utama : kesehatan reproduksi, pemberdayaan (pendidikan dan keterwakilan politik), dan partisipasi pasar kerja	Badan Pusat Statistik	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
35	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase	Persentase jumlah anak dalam situasi atau kondisi yang mengancam tumbuh kembangnya, sehingga membutuhkan intervensi dan layanan khusus dari pemerintah dan lembaga terkait, yang berhasil menerima pelayanan secara menyeluruh mencakup penanganan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, serta reintegrasi sosial, dibandingkan dengan jumlah total AMPK yang terdata dalam suatu wilayah pada periode waktu tertentu	Laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(Jumlah anak memerlukan perlindungan layanan komprehensif dibagi Total jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus) dikali 100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
36	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	Ukuran persentase perempuan yang mengalami kekerasan (termasuk TPPO) dan berhasil mendapatkan dukungan menyeluruh yang mencakup berbagai aspek seperti pelayanan medis, psikososial (konseling), hukum, dan rujukan yang memenuhi kebutuhan mereka secara utuh	Laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(Jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif dibagi total perempuan korban kekerasan dan TPPO) dikali 100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Sumber Data	Formulasi (Rumus)	Penanggung Jawab Data	Unit Penanggung Jawab
37	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah indikator komposit yang menggambarkan kondisi kualitas lingkungan suatu wilayah secara umum, dihitung berdasarkan tiga komponen utama yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL), masing-masing dengan bobot 0,376 untuk IKA, 0,405 untuk IKU, dan 0,219 untuk IKL.	Laporan Akhir IKLH Kab. Tangerang	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$	Kementrian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
38	Indeks Kualitas Air	Indeks	Penghitungan gabungan dari semua parameter sample air selama 1 tahun	Laporan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	$PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/LQ)_{maks}^2 + (C_i/LQ)_{min}^2}{2}}$ Keterangan: • PI_j (Indeks Pencemaran) = nilai indeks kualitas air pada lokasi ke-j • C_i = konsentrasi parameter kualitas air hasil pengukuran • LQ = baku mutu parameter ke-i untuk peruntukan ke-j • $(C_i/LQ)_{maks}$ = nilai tertinggi ratio C_i terhadap LQ • $(C_i/LQ)_{min}$ = nilai rata-rata ratio C_i terhadap LQ	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
39	Indeks Kualitas Udara	Indeks	penghitungan rata-rata NO2 dan SO2 dari beberpa titik di wilayah kabupaten tangerang selama 1 tahun	Laporan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	$IKU = 100 - \left(\frac{NO_2}{50} + \frac{SO_2}{54,3} \right)$ $I_{ku} = \frac{Indeks\ NO_2 + Indeks\ SO_2}{2}$ $Indeks\ NO_2 = \frac{Baku\ Mutu\ E_0}{Baku\ Mutu\ E_u}$ $Indeks\ SO_2 = \frac{Baku\ Mutu\ E_0}{Baku\ Mutu\ E_u}$	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
40	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	Penghitungan luasan tutupan lahan Penggunaan data citra satelit Landsat dengan perincian data Pemantauan kondisi ruang terbuka hijau dan rehabilitasi hutan dan lahan	Laporan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung IKTL: $IKTL = 100 - ((84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$ Dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TL = Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
41	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	Penghitungan meliputi pengurangan, penanganan, dan pelayanan persampahan kepada masyarakat sesuai	Laporan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	$IKPS = \frac{\text{Skor Capaian Indikator Aktual}}{\text{Skor Target Maksimal}} \times 100$	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
42	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	Indeks Pelayanan Publik adalah Hasil penilaian evaluasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian PAN RB yang meliputi 6 aspek yaitu: 1. Kebijakan Pelayanan 2. Profesionalisme SDM 3. Sarana Prasarana 4. Sistem Informasi Pelayanan Publik 5. Konsultasi dan Pengaduan	Laporan hasil evaluasi pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Tangerang yang diterbitkan oleh KemenPAN RB	Nilai Indeks Pelayanan Publik : 75% Nilai indeks formulir F02 + 25% Nilai Indeks Formulir F03 Keterangan : Nilai per indikator F02: Nilai F02 x bobot per indikator Nilai per indikator F03: Nilai F03 x bobot per indikator Nilai per aspek : $\sum$ nilai per indikator Nilai indeks formulir : $\sum$ (Nilai per aspek x bobot aspek)	KEMENPAN RB	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Sumber Data	Formulasi (Rumus)	Penanggung Jawab Data	Unit Penanggung Jawab
43	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	Berdasarkan Perpres 12 Tahun 2025 Indeks kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil meliputi 3 dimensi yaitu : a. Dimensi layanan dengan indicator cakupan akta kelahiran, cakupan akta kematian, cakupan akta perkawinan, cakupan akta perceraian dan cakupan kepemilikan KIA. b. Pemanfaatan data kependudukan dengan indikator peningkatan PKS Daerah dalam satu tahun. c. Dimensi IKD dengan indicator persentase pemanfaatan IKD terhadap penduduk wajib KTP-el	Laporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil = $100/3,8 \times \{(\text{skor dimensi layanan} \times 70\%) + (\text{skor dimensi pemanfaatan data kependudukan} \times 20\%) + (\text{skor implementasi IKD} \times 10\%)\}$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
44	Indeks Desa	Indeks	Indeks Desa adalah sebuah indikator tunggal dan komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan dan kemandirian desa secara menyeluruh, yang terdiri dari tiga dimensi utama: Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekonomi, dan Ketahanan Ekologi/Lingkungan	Laporan Peringkat Indeks Desa Membangun yang di publikasikan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	$Y = \frac{\text{Total Skor X}}{\text{Nilai maksimum Skor Indeks Desa}}$ Keterangan: Y = Komponen Indeks yang terdiri dari Indeks Dimensi Layanan dasar, total indeks Dimensi Sosial, total indeks Dimensi Ekonomi, total indeks Dimensi lingkungan, total indeks Dimensi aksesibilitas, dan total indeks Dimensi tata kelola pemerintahan Desa. X = Indikator X	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
45	Jumlah Desa Mandiri	Desa	Jumlah desa yang telah berhasil mencapai status desa mandiri				
46	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga yang dibentuk dari 17 variabel serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: a. iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40. b. iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40–70. c. iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.	Laporan Profil DPPKB	Tentu, berikut adalah transkripsi dari gambar yang Anda berikan: Indeks Ketentraman= $\text{Maks Skor Ketentraman} - \text{Min Skor Ketentraman} \times 100$ Skor Total Ketentraman–Min Skor Ketentraman Indeks Kemandirian= $\text{Maks Skor Kemandirian} - \text{Min Skor Kemandirian} \times 100$ Skor Total Kemandirian–Min Skor Kemandirian Indeks Kebahagiaan= $\text{Maks Skor Kebahagiaan} - \text{Min Skor Kebahagiaan} \times 100$ Skor Total Kebahagiaan–Min Skor Kebahagiaan Keterangan: Maksimal skor dan minimal skor adalah nilai skor maksimum dan minimal yang mungkin terjadi pada setiap dimensi iBangga= $\text{Indeks Ketentraman} + \text{Indeks Kemandirian} + \text{Indeks Kebahagiaan}$ 3	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
47	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	Ukuran pembangunan daerah yang memperhatikan dimensi kependudukan melalui integrasi variabel demografi seperti kelahiran, kematian, migrasi, dan kualitas penduduk dalam kebijakan pembangunan.	Laporan DPPKB	IPBK dihitung dari rata-rata berbobot lima dimensi: (1)Kualitas penduduk, (2)Kuantitas penduduk, (3)Persebaran penduduk, (4)Mobilitas penduduk, dan (5)Kelembagaan kependudukan. Nilai hasil komposit dikonversi dalam skala 0–100.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Sumber Data	Formulasi (Rumus)	Penanggung Jawab Data	Unit Penanggung Jawab
48	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka	Jumlah kelahiran hidup yang terjadi pada perempuan usia 15–19 tahun per 1.000 perempuan dalam kelompok umur yang sama pada tahun tertentu.	Laporan DPPKB	ASFR 15–19 = (Jumlah kelahiran hidup dari ibu usia 15–19 tahun / Jumlah perempuan usia 15–19 tahun) × 1.000.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
49	TFR (Angka Kelahiran Total)	Jiwa	Jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (usia 15–49 tahun) dengan asumsi mengikuti tingkat fertilitas per umur pada periode tertentu.	Laporan DPPKB	TFR = Σ (ASFR tiap kelompok umur × 5) / 1.000.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
50	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Persentase	Persentase wanita usia subur (WUS) yang mengalami kehamilan tanpa perencanaan, baik karena belum menginginkan anak maupun tidak menginginkan anak lagi.	Laporan DPPKB	Persentase KTD = (Jumlah WUS dengan kehamilan tidak direncanakan / Jumlah seluruh WUS yang hamil) × 100%.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
51	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	%	Proporsi wanita usia subur yang ingin menjarangkan atau menghentikan kelahiran dan saat ini menggunakan metode kontrasepsi modern (pil, suntik, IUD, implan, kondom, MOW/MOP).	Laporan DPPKB	Met Need Modern KB = (Jumlah WUS yang ingin menjarangkan/menghentikan kelahiran dan memakai)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
52	V/C Rasio di Jalan Kabupaten Tangerang	Rasio	Hasil Pengukuran Kinerja Lalu Lintas Pada Ruasa Jalan Kewenangan Kabupaten Tangerang	Laporan Dinas Perhubungan	V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
53	Rasio Konektivitas Kabupaten	Rasio	Mengetahui Tingkat Konektivitas Jaringan Transportasi Darat dan Sungai, Danau, dan Penyebrangan di wilayah kewenangan Kabupaten Tangerang	Laporan Dinas Perhubungan	Perhitungan Rumusan = Jumlah Trayek Eksisting 27 x 1 Kebutuhan Trayek 49 = 0,55	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
54	Indeks Pemdi	Indeks	Indeks Pemerintah Digital untuk mengukur kinerja transformasi digital di instansi pemerintah Indonesia. Indeks ini untuk mengevaluasi kesiapan dan kualitas tata kelola, layanan, dan infrastruktur digital di pemerintahan.	Laporan Hasil Perhitungan Indeks PEMDI oleh Diskominfo	Indeks PEMDI = Σ (Skor Indeks Indikator Penilaian PEMDI)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
55	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) untuk pemerintah daerah adalah alat ukur untuk menilai kinerja komunikasi publik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota	Laporan Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks KIP = skor indeks dari komisi informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
56	Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	%	Tingkat kematangan keamanan siber dan sandi adalah persentase yang menggambarkan kondisi kesiapan kerangka kerja keamanan informasi Pemerintah Daerah. Persentase ini didapatkan dari hasil pengukuran Indeks KaMI v5.0	Laporan Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks KAMI = skor indeks dari BSSN	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Sumber Data	Formulasi (Rumus)	Penanggung Jawab Data	Unit Penanggung Jawab
57	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	Nilai indeks pembangunan statistik merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pembangunan statistik dan penyelenggaraan Statistik Sektoral secara keseluruhan	Laporan Dinas Komunikasi dan Informatika	$= \sum_{k=1}^K \frac{Indeks\ Pembangunan\ Statistik\ k}{Nilai\ Domain\ k} \times 100$	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
58	Kontribusi sektor koperasi dan Usaha Mikro terhadap PDRB	%	persentase nilai tambah bruto (value added) yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi koperasi dan usaha mikro terhadap total nilai PDRB Kabupaten Tangerang dalam periode tertentu.	Laporan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	$\frac{(\text{Total Omset Usaha Mikro} + \text{Volume Usaha Koperasi})}{\text{PDRB Kab. Tangerang}} \times 100\%$	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
59	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun	Laporan Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB di Diskum	$\frac{\text{Volume Usaha Koperasi}}{\text{PDRB Kab. Tangerang}} \times 100\%$	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
60	Rasio Wirausaha	%	persentase jumlah penduduk yang memiliki dan menjalankan kegiatan usaha secara mandiri terhadap total jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) di wilayah Kabupaten Tangerang dalam satu tahun tertentu.	Laporan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	$\frac{\text{Jumlah Wirausaha}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Produktif}} \times 100\%$	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
61	Pembentukan Modal Tetap Bruto Terhadap PDRB	% PDRB	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap total PRDB	Publikasi BPS	$\frac{\text{Pembentukan Modal Tetap Bruto}}{\text{PDRB ADHK}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Sumber Data	Formulasi (Rumus)	Penanggung Jawab Data	Unit Penanggung Jawab																								
62	Nilai Realisasi Investasi	Angka	Nilai realisasi investasi sesuai release dari Kementrian Investasi dan Hilirisasi / BKPM RI	Laporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) + Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																								
63	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan	Indeks	Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Laporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	IKM = $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsor}}{\text{Total unsur yang terisi}}$ x $\frac{\text{Nilai penimbang}}$	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																								
64	Persentase Pemuda Yang Berwirausaha	%	Persentase pemuda yang menjalankan kegiatan usaha secara mandiri, baik usaha perorangan maupun kelompok, yang menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan ekonomi	Laporan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	Jumlah Pemuda yang aktif berwirausaha dibagi dengan jumlah Pemuda (16-30 tahun) dikali 100 persen	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata																								
65	Persentase Atlet Yang Berprestasi	%	persentase atlet yang meraih medali pada kompetisi/kejuaraan tingkat daerah, nasional dan internasional	Laporan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	Jumlah atlet yang berprestasi dibagi dengan jumlah atlet yang dibina dikali 100 persen	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata																								
66	Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan Daerah yang dikembangkan	%	Presentase kelompok kesenian dan kebudayaan yang mendapatkan pembinaan serta berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan di Kabupaten Tangerang atau yang mewakili Kabupaten Tangerang pada kegiatan di luar daerah.	Laporan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	Jumlah kesenian dan kebudayaan yang dibina dan dikembangkan dibagi jumlah kesenian dan kebudayaan yang ada	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata																								
67	Persentase kunjungan wisatawan	%	Presentase Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Tangerang dengan tujuan berlibur ataupun melakukan aktivitas lainnya	Laporan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan tahun N - Jumlah kunjungan wisatawan tahun N-1 X 100% / Jumlah kunjungan wisatawan tahun N-1	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata																								
68	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Provinsi dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat, yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM).	Laporan Profil Disperpusip	UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan; UPLM 2 = Ketercukupan koleksi; UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan; UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan; UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP; UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan; UPLM 7 = Anggota perpustakaan. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat = $\sum \text{UPLM} \times 100 \text{ ALM}$	Perpustakaan Nasional	Dinas Perpustakaan dan Arsip																								
69	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	kegemaran membaca masyarakat disuatu pemerintah daerah dengan mengukur sejumlah variabel utama seperti: Indikator Frekuensi Membaca, Indikator Durasi Membaca, Indikator Jumlah Bahan Bacaan, Frekuensi Akses Internet dan Durasi Akses Internet, untuk Penetapan sampel (5% dari total populasi usia membaca penduduk berusia 15-69 tahun di Provinsi).	Laporan Dinas Perpustakaan dan Arsip	Berdasarkan cara penghitungan TGM yaitu: Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat <table><tr><th>No</th><th>Aktivitas Membaca</th><th>Nilai</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Frekuensi Membaca</td><td></td><td rowspan="5">Lampirkan Hasil Survei Kegemaran Membaca</td></tr><tr><td>2.</td><td>Durasi Membaca</td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td>Jumlah Bahan Bacaan</td><td></td></tr><tr><td>4.</td><td>Frekuensi Akses Internet</td><td></td></tr><tr><td>5.</td><td>Durasi Akses Internet</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>$T = \frac{(a + 1 + a + 3) f}{4}$</td><td>-----</td></tr></table>	No	Aktivitas Membaca	Nilai	Keterangan	1.	Frekuensi Membaca		Lampirkan Hasil Survei Kegemaran Membaca	2.	Durasi Membaca		3.	Jumlah Bahan Bacaan		4.	Frekuensi Akses Internet		5.	Durasi Akses Internet		Jumlah		$T = \frac{(a + 1 + a + 3) f}{4}$	-----	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip
No	Aktivitas Membaca	Nilai	Keterangan																												
1.	Frekuensi Membaca		Lampirkan Hasil Survei Kegemaran Membaca																												
2.	Durasi Membaca																														
3.	Jumlah Bahan Bacaan																														
4.	Frekuensi Akses Internet																														
5.	Durasi Akses Internet																														
Jumlah		$T = \frac{(a + 1 + a + 3) f}{4}$	-----																												

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Sumber Data	Formulasi (Rumus)	Penanggung Jawab Data	Unit Penanggung Jawab
70	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan (Peraturan ANRI nomor 6 tahun 2019)	Laporan Dinas Perpustakaan dan Arsip	a) Kebijakan (15%) b) Pembinaan (25%) c) Pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun (10%) d) Pengelolaan arsip statis yang meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses (30%) e) Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipab, organisasi kearsipan,	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip
71	Produksi Olahan Perikanan	Produk	Jumlah Produksi Olahan Perikanan di Kabupaten Tangerang	Laporan Dinas Perikanan	Total Produksi Olahan Perikanan di Kabupaten Tangerang selama 1 (Satu) Tahun	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
72	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota (sumber data : one data KKP)	Ton	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) di Kabupaten Tangerang	Laporan Dinas Perikanan	Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) di Kabupaten Tangerang dalam 1 (Satu) Tahun	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
73	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB	%	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB/PDB adalah persentase nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Produk Domestik Bruto (PDB) pada periode tertentu.	publikasi Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tangerang (persen) oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang	Kontribusi Perdagangan= (PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan)/Total PDRB x 100%	Badan Pusat Statistik	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
74	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	(%)	Ketidacukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.	Publikasi BPS Mengenai Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	$PoU \equiv \int_{x < MDER} f(x) dx$ 1. f(x) = distribusi probabilitas konsumsi energi per kapita (biasanya diasumsikan distribusi log-normal) 2. MDER = Minimum Dietary Energy Requirement (kebutuhan energi minimum, berbeda per negara/kelompok umur/jenis kelamin)	Badan Pusat Statistik	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
75	Pemenuhan Kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Beras)	Persentase	Pemenuhan cadangan pangan pemerintah daerah (beras) terhadap kebutuhan minimal yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Laporan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	(Jumlah cadangan pangan daerah yang tersedia ÷ Kebutuhan minimal cadangan pangan daerah) × 100%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
76	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persentase	tingkat pertumbuhan produksi tanaman pangan utama padi dan jagung dibandingkan tahun sebelumnya.	Laporan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	((Produksi tahun berjalan – Produksi tahun sebelumnya) ÷ Produksi tahun sebelumnya) × 100%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Sumber Data	Formulasi (Rumus)	Penanggung Jawab Data	Unit Penanggung Jawab
77	Peningkatan Produksi Hortikultura	Persentase	tingkat pertumbuhan produksi hortikultura cabai merah, cabai rawit, bawang merah, sayuran daun, dan sayuran buah dibandingkan tahun sebelumnya.	Laporan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	$((\text{Produksi tahun berjalan} - \text{Produksi tahun sebelumnya}) \div \text{Produksi tahun sebelumnya}) \times 100\%$	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
78	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	Mutu dan keragaman konsumsi pangan masyarakat berdasarkan keseimbangan antara kelompok pangan yang dikonsumsi dengan pola pangan yang ideal.	Laporan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	$\text{Skor PPH} = (\sum \text{Proporsi konsumsi energi kelompok pangan aktual} \div \text{Proporsi ideal}) \times 100$	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
79	Peningkatan Produksi Komoditas Perternakan	%	tingkat pertumbuhan produksi komoditas peternakan daging ruminansia, daging unggas, dan telur dibandingkan tahun sebelumnya.	Laporan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	$((\text{Produksi tahun berjalan} - \text{Produksi tahun sebelumnya}) \div \text{Produksi tahun sebelumnya}) \times 100\%$	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
80	Indeks Perkembangan Harga	%	Indeks Perkembangan Harga (IPH) adalah ukuran statistik yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menunjukkan perubahan harga dari 20 komoditas pangan penting yang memiliki bobot besar dalam Indeks Harga Konsumen (IHK).	Laporan Hasil survey harga 20 komoditas pangan oleh BPS	$\text{Indeks Perkembangan Harga (Indeks)} = (\text{Total Harga Saat Ini} / \text{Total Harga Dasar}) \times 100\%$	Badan Pusat Statistik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
81	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB/PDB adalah persentase nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Produk Domestik Bruto (PDB) pada periode tertentu.	publikasi Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tangerang (persen) oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang	$\text{Kontribusi Industri Pengolahan} = \text{PDRB Sektor Industri Pengolahan} / \text{Total PDRB} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
82	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB/PDB adalah persentase nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh sektor perdagangan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Produk Domestik Bruto (PDB) pada periode tertentu.	publikasi Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tangerang (persen) oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang	$\text{Kontribusi Perdagangan} = \text{PDRB Sektor Perdagangan} / \text{Total PDRB} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
83	Nilai AKIP	Angka	predikat atau tingkatan kinerja yang menunjukkan seberapa baik sebuah instansi pemerintah dalam mengelola dan bertanggungjawabkan kinerjanya. Nilai ini diukur melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mencakup aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja.	Laporan Hasil Evaluasi AKIP yang dikeluarkan oleh KemenPAN RB	$\text{Nilai AKIP} = \sum_{i=1}^5 (\text{Bobot Komponen}_i \times \text{Nilai Komponen}_i)$ Hasil Evaluasi AKIP dihitung dengan menjumlahkan angka hasil pembobotan dari 4 komponen SAKIP yaitu, Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Internal.	KEMENPAN RB	Sekretariat Daerah

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Sumber Data	Formulasi (Rumus)	Penanggung Jawab Data	Unit Penanggung Jawab
84	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	Indeks Reformasi Hukum yang dikeluarkan oleh Kemenkum	Laporan Sekretariat Daerah	FORMULA NILAI APRESIASI PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA TAHUN 2022: Nilai Akhir Nilai IRH $f(x) = X_o + (X_{max} - X_o) \cdot 80\%$ Dimana: f(x) = Nilai akhir IRH X_o = Nilai awal IRH X_{max} = Nilai maksimum IRH Koeffisien pengali = 0,8 (80%)	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
85	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks	Indeks Tata Kelola Pengadaan penilaian LKPP	Laporan Sekretariat Daerah	✿ Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan dengan Skor Maksimal: 30 dengan Bobot 30% terdiri dari: 1. Nilai RUP SIRUP dibandingkan dengan nilai belanja PBJ Skor Maksimal: 10 2. Jumlah paket selesai dibandingkan jumlah paket aktif untuk ePurchasing (Katalog Elektronik) Skor Maksimal: 4 3. Nilai realisasi dibandingkan dengan nilai RUP untuk Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung Skor Maksimal: 5 4. Nilai realisasi dibandingkan dengan nilai RUP untuk eTendering Skor Maksimal: 5 5. Sudah pernah melakukan ePurchasing melalui Toko Daring Skor Maksimal: 1 6. Jumlah paket dicatatkan dalam eKontrak dibandingkan jumlah paket transaksional Skor Maksimal: 5 ✿ Indikator Kualifikasi & Kompetensi SDM PBJ dengan Skor Maksimal 30 dan Bobot 30% ✿ Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ dengan Skor Maksimal 40 dan Bobot 40%	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
86	Nilai SAKIP komponen pelaporan kinerja daerah	Nilai	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Tangerang untuk komponen pelaporan kinerja Pemda hasil evaluasi Kemenpan RB	Laporan Sekretariat Daerah	Dihitung dari penjumlahan nilai bobot subkomponen pelaporan kinerja (Keberadaan, kualitas dan kebermanfaatan)	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
87	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	indikator kinerja yang menggambarkan sejauh mana anggota DPRD merasa puas terhadap layanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pelayanan tersebut meliputi aspek administrasi, persidangan, fasilitasi keuangan, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan informasi, serta dukungan teknis lainnya.	Laporan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan = (Total skor jawaban responden) / (Jumlah responden)	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Sumber Data	Formulasi (Rumus)	Penanggung Jawab Data	Unit Penanggung Jawab
88	Ketepatan Penetapan Raperda Tahun N	%	indikator kinerja yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berhasil dibahas, disepakati, dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) oleh DPRD bersama Kepala Daerah, sesuai dengan daftar prioritas yang ditetapkan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan meningkatnya produktivitas fungsi legislasi DPRD serta dukungan pemerintah daerah dalam membentuk regulasi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat	Laporan Sekretariat DPRD	Persentase Raperda = (Jumlah Raperda yang ditetapkan / Jumlah Raperda dalam Prolegda) x 100%	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
89	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	Alat ukur kinerja perencanaan pembangunan yang digunakan untuk menilai kualitas perencanaan daerah, dalam rangka menjamin keselarasan pusat-daerah, meningkatkan kualitas substansi dokumen, serta menghubungkan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja.	Laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	IPPD = (Skor Sinergi ÷ Bobot Maksimal Sinergi) × Bobot Sinergi + (Skor Kualitas ÷ Bobot Maksimal Kualitas) × Bobot Kualitas + (Skor Keterhubungan ÷ Bobot Maksimal Keterhubungan) × Bobot Keterhubungan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
90	Persentase hasil riset yang dijadikan dasar perumusan kebijakan daerah	%	Besaran atau proporsi kontribusi hasil riset/kajian yang digunakan atau diterapkan dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang relevan dengan isu-isu strategis pembangunan daerah	Laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	% hasil riset/kajian yang dijadikan dasar penyusunan kebijakan dibagi jumlah kajian yang dihasilkan dalam periode renstra	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
91	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja Pemda	Nilai	Skor penilaian terhadap kualitas penyusunan perencanaan kinerja pemerintah daerah, yang mencerminkan keterkaitan logis dan konsistensi antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, program, kegiatan, dan alokasi anggaran, sebagaimana diukur dalam evaluasi SAKIP oleh Kementerian PANRB	Laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah skor dari seluruh elemen penilaian perencanaan Kinerja Pemda hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB *) LHE SAKIP Pemkab oleh KEMENPAN RB	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
92	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja Pemda	Nilai	Skor penilaian terhadap mekanisme dan kualitas sistem pengukuran kinerja yang digunakan oleh pemerintah daerah, yang mencerminkan kejelasan, konsistensi, serta kesesuaian indikator dan target kinerja dengan capaian aktual, berdasarkan evaluasi SAKIP oleh Kementerian PANRB	Laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Skor Aspek Pengukuran Kinerja Pemda hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB *) LHE SAKIP Pemkab oleh KEMENPAN RB	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
93	Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Indeks	merupakan instrumen untuk memetakan, memonitor perkembangan elektronifikasi transaksi Pemda dan mengukur perbandingan elektronifikasi transaksi Pemda di suatu daerah relatif terhadap daerah lainnya	Hasil Skoring Indeks ETPD yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia	$IE\text{ETPD} = \sum_{i=1}^3 (\text{Bobot Aspek}_i \times \text{Skor Aspek}_i)$ I-ETPD = (Skor Implementasi × 70%) + (Skor Realisasi × 10%) + (Skor Lingkungan Strategis × 20%)	Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Sumber Data	Formulasi (Rumus)	Penanggung Jawab Data	Unit Penanggung Jawab
94	Nilai Indeks Kemandirian Fiskal	Indeks	Indeks Kemandirian Fiskal sama dengan 1 -DAU, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dana desa, transfer antar daerah (pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan) ditambah DAK ditambah Pinjaman Daerah ditambah dana bagi hasil yang dibagi oleh Pendapatan Asli Daerah (termasuk pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah) ditambah DAU, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dana desa, transfer antar daerah (pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan) ditambah DAK ditambah Pinjaman Daerah ditambah dana bagi hasil	Laporan Badan Pendapatan Daerah	$IKF = 1 - \frac{TUGP + TUSP + B + REVSH}{REVOR + TUGP + TUSP + B + REVSH}$ Keterangan: IKF : Indeks Kemandirian Fiskal; REVOR : Pendapatan Asli Daerah yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; TUGP : <i>General Purpose Transfer</i> (DAU), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, Dana Desa, dan Pendapatan Transfer antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan) TUSP : Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik dan DAK Non-Fisik) B : <i>Subnational Borrowing</i> (Penerimaan Pinjaman Daerah) REVSH : Dana Bagi Hasil yang terdiri atas: a. DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); b. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21; c. DBH cukai yang bersumber dari cukai hasil tembakau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. DBH sumber daya alam. A1 Gc	Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
95	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	%	Satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu.	Lapora dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri	Formulasi perhitungan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dilakukan dengan menilai enam dimensi utama yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (bobot 15), pengalokasian anggaran dalam APBD (20), transparansi pengelolaan keuangan daerah (15), penyerapan anggaran (20), kondisi keuangan daerah (15), dan opini BPK atas LKPD (15). Setiap indikator pada dimensi dihitung melalui normalisasi nilai atau pemberian skor biner (1 jika memenuhi, 0 jika tidak), kemudian dirata-ratakan untuk memperoleh skor dimensi, lalu dikalikan dengan bobot dimensi. Hasil dari semua dimensi dijumlahkan sehingga menghasilkan nilai IPKD dalam rentang 0–100 yang mencerminkan kualitas tata kelola keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.	Kementerian Dalam Negeri	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
96	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persentase	Pengukuran untuk mengetahui persentase penambahan nilai Aset Tetap yang dimiliki Pemkab Tangerang dengan tahun sebelumnya	Laporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Selisih Nilai Aset Tetap tahun N dengan tahun sebelumnya dibagi dengan Nilai Aset Tetap tahun sebelumnya	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
97	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	Pengukuran untuk mengetahui persentase realisasi PAD yang menjadi kewenangan BPKAD (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah) terhadap Realisasi Total Pendapatan Daerah	Laporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Realisasi PAD yang menjadi kewenangan BPKAD (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah) dibagi dengan Realisasi Total Pendapatan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
98	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Persentase	Pengukuran untuk mengetahui Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD terhadap APBD	Laporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD dibagi dengan Total Anggaran Belanja Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
99	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persentase	Pengukuran untuk mengetahui persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik terhadap APBD	Laporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dibagi dengan Anggaran Total Belanja Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
100	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persentase	Pengukuran untuk mengetahui persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang dilaporkan tepat waktu	Laporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan total Perangkat Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Sumber Data	Formulasi (Rumus)	Penanggung Jawab Data	Unit Penanggung Jawab
101	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persentase	Pengukuran untuk mengetahui Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar terhadap realisasi Belanja Daerah	Laporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar dibagi dengan Total Realisasi Belanja Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
102	Persentase Penurunan SILPA	Persentase	Pengukuran untuk mengetahui persentase Persentase Penurunan SILPA tahun berjalan dengan tahun sebelumnya	Laporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Selisih SILPA tahun N dengan tahun sebelumnya dibagi dengan Total SILPA tahun sebelumnya	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
103	Indeks Professionalitas ASN	Nilai	Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.	Laporan Hasil Pengukuran IPA yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).	IP ASN = Σ (Skor Indeks Indikator Penilaian IP ASN) IP ASN diperoleh melalui evaluasi yang dilakukan Kepegawaian Negara (BKN) berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Evaluasi IP ASN meliputi 4 (empat) dimensi dengan bobot yaitu: Kualifikasi (25%), Kompetensi (40%), Kinerja (30%), dan Disiplin (5%). Nilai IP ASN didapat dari penjumlahan nilai tiap dimensi yang telah dikalikan dengan bobot masing-masing.	Badan Kepegawaian Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
104	Indeks Sistem Merit	Nilai	Ukuran tingkat penerapan sistem merit dalam manajemen ASN pada suatu instansi pemerintah, yang mencerminkan pengelolaan ASN berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan tanpa diskriminasi.	Laporan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	Dihitung berdasarkan 8 aspek penerapan sistem merit: 1)Perencanaan Kebutuhan ASN (Anjab/ABK) 2)Pengadaan ASN 3)Pengembangan Karier ASN 4)Promosi & Mutasi ASN 5)Manajemen Kinerja ASN 6)Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin 7)Perlindungan ASN 8)Sistem Informasi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
105	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	adalah tingkat kematangan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diintegrasikan dengan manajemen risiko, pengendalian intern atas pelaporan keuangan, serta pengawasan intern, yang diukur berdasarkan hasil penilaian oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan skala level 1 (Paling Rendah) sampai dengan level 5 (Optimal).	LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI PADA PMERINTAH KABUPATEN TANGERANG OLEH BPKP	$\text{Skor Maturitas SPIP} = \sum_{i=1}^5 (\text{Bobot Unsuri} \times \text{Skor Unsuri}_i)$ Capaian indikator Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi diperoleh melalui proses evaluasi yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Proses penilaian dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang telah diintegrasikan dengan manajemen risiko, pengendalian intern atas pelaporan keuangan, dan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah.	BPKP BANTEN	Inspektorat Kabupaten
106	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	%	Jumlah Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi dikali 100% (**Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten)	Laporan Inspektorat Kabupaten	Prosentase Capaian = $\frac{\text{TLRT}}{\text{JRT}} \times 100 \%$ TLRT Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan (TLRT) Jumlah Rekomendasi Temuan (JRT)	Inspektorat Kabupaten	Inspektorat Kabupaten

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Sumber Data	Formulasi (Rumus)	Penanggung Jawab Data	Unit Penanggung Jawab
107	Nilai Kapabilitas APIP	Nilai	Hasil QA dari Tim BPKP Perwakilan Provinsi Banten	Laporan Inspektorat Kabupaten	Nilai kapabilitas APIP diukur berdasarkan beberapa indikator yang meliputi aspek kualitas SDM, sistem, dan infrastruktur yang digunakan dalam pengawasan. Terdiri dari 6 elemen antara lain: 1. Pengelolaan sumber Daya Manusia 2. Praktik Profesional 3. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja 4. Budaya dan Hubungan Organisasi 5. Struktur Tata Kelola 6. Peran dan Layanan	Inspektorat Kabupaten	Inspektorat Kabupaten
108	Indeks Harmoni	Indeks	Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) merupakan alat ukur yang dikembangkan untuk memahami, memantau, dan meningkatkan harmoni sosial di berbagai wilayah Indonesia dengan mengukur 4 dimensi yaitu ekonomi, sosial, budaya dan keberagamaan. Adapun IHaI mencakup 5 tujuan diantaranya: 1. Sosialisasi dan Edukasi 2. Potret dan Pemetaan Skor PPA 3. Menggali Data Usul Saran dan Kritik 4. Mendapatkan Evidence dan 5. Menyajikan Saran dan Rekomendasi.	Laporan Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) Direktorat Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri	$IHaI = \sum (k_i X_i)$ Mencerminkan pengukuran Indeks Harmoni Indonesia dengan menggabungkan variabel-variabel (X_i) dan bobot (k_i) masing-masing. Formula ini memperlihatkan pendekatan agregatif di mana nilai setiap variabel dikalikan dengan bobotnya, dan kemudian dijumlahkan untuk menghasilkan nilai akhir Indeks Harmoni Indonesia. Dalam konteks rumus ini: 1. IHaI: Nilai akhir dari Indeks Harmoni. 2. $\sum$: Simbol sigma yang menunjukkan operasi penjumlahan. 3. k_i : Bobot yang diberikan pada setiap variabel X_i 4. X_i : Variabel-operasional yang mencerminkan aspek tertentu dari kondisi harmoni.	KEMENDAGRI	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
109	Indeks Karakter Masyarakat	Indeks	Indeks Karakter masyarakat adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai karakter masyarakat yang didasarkan pada dimensi religiustas, nasionalisme, kemandirian, dan gotong royong	Laporan kajian Indeks karakter masyarakat	Jumlah skor indeks dimensi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
110	Nilai Dimensi Budaya	Nilai	Mengukur penerimaan dan penghargaan terhadap keragaman budaya, kolaborasi antarbudaya dalam kegiatan masyarakat, integrasi nilai-nilai positif antarbudaya, komunikasi antarbudaya yang harmonis, serta dukungan pemerintah dan masyarakat terhadap keberagaman budaya	Laporan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4. Rumusan nilai akhir (skor gabungan) Gabungkan nilai dari semua indikator dan bobotnya untuk mendapatkan skor akhir. • Rumus sederhana: $Skor\ Gabungan = \sum (Nilai\ IKK \times Bobot\ IKK)$ • Contoh aplikasi rumus: ◦ Asumsi: ◦ Penerimaan: Target partisipasi 1.000 orang, tercapai 800 orang (80%). Skor 80. ◦ Kolaborasi: Target 10 proyek, tercapai 8 proyek (80%). Skor 80. ◦ Integrasi: Target 50 sekolah, tercapai 40 sekolah (80%). Skor 80. ◦ Dukungan: Target anggaran Rp5 miliar, terealisasi Rp4 miliar (80%). Skor 80.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
111	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	Nilai	mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Laporan Kecamatan Tigaraksa	Rumus Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) : $SKM = \left(\frac{\sum_{i=1}^n NHR_i}{n} \right) \times 25$ Penjelasan: • NHR (Nilai Rata-rata Responden) = Total nilai yang diberikan responden terhadap setiap unsur pelayanan. • n = Jumlah unsur pelayanan (biasanya 9 unsur dalam SKM pemerintahan).	Kecamatan Tigaraksa	Kecamatan Tigaraksa
112	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	Nilai	mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Laporan Kecamatan Cikupa	Rumus Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) : $SKM = \left(\frac{\sum_{i=1}^n NHR_i}{n} \right) \times 25$ Penjelasan: • NHR (Nilai Rata-rata Responden) = Total nilai yang diberikan responden terhadap setiap unsur pelayanan. • n = Jumlah unsur pelayanan (biasanya 9 unsur dalam SKM pemerintahan).	Kecamatan Cikupa	Kecamatan Cikupa
113	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	Nilai	mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Laporan Kecamatan Panongan	Rumus Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) : $SKM = \left(\frac{\sum_{i=1}^n NHR_i}{n} \right) \times 25$ Penjelasan: • NHR (Nilai Rata-rata Responden) = Total nilai yang diberikan responden terhadap setiap unsur pelayanan. • n = Jumlah unsur pelayanan (biasanya 9 unsur dalam SKM pemerintahan).	Kecamatan Panongan	Kecamatan Panongan

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Sumber Data	Formulasi (Rumus)	Penanggung Jawab Data	Unit Penanggung Jawab
114	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	Nilai	mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Laporan Kecamatan Curug	Skor: $\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Nilai}}{n} \right) \times 25$ Penjelasan: • SKM (Nilai Rata-rata Responden) = Total nilai yang diberikan responden terhadap setiap unsur pelayanan. • n = Jumlah unsur pelayanan (maksudnya 9 unsur dalam SKM pemerintahan).	Kecamatan Curug	Kecamatan Curug
115	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	Nilai	mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Laporan Kecamatan Legok	Skor: $\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Nilai}}{n} \right) \times 25$ Penjelasan: • SKM (Nilai Rata-rata Responden) = Total nilai yang diberikan responden terhadap setiap unsur pelayanan. • n = Jumlah unsur pelayanan (maksudnya 9 unsur dalam SKM pemerintahan).	Kecamatan Legok	Kecamatan Legok
116	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	Nilai	mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Laporan Kecamatan Pasar Kemis	Skor: $\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Nilai}}{n} \right) \times 25$ Penjelasan: • SKM (Nilai Rata-rata Responden) = Total nilai yang diberikan responden terhadap setiap unsur pelayanan. • n = Jumlah unsur pelayanan (maksudnya 9 unsur dalam SKM pemerintahan).	Kecamatan Pasar Kemis	Kecamatan Pasar Kemis
117	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	Nilai	mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Laporan Kecamatan Balaraja	Skor: $\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Nilai}}{n} \right) \times 25$ Penjelasan: • SKM (Nilai Rata-rata Responden) = Total nilai yang diberikan responden terhadap setiap unsur pelayanan. • n = Jumlah unsur pelayanan (maksudnya 9 unsur dalam SKM pemerintahan).	Kecamatan Balaraja	Kecamatan Balaraja
118	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	Nilai	mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Laporan Kecamatan Kresek	Skor: $\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Nilai}}{n} \right) \times 25$ Penjelasan: • SKM (Nilai Rata-rata Responden) = Total nilai yang diberikan responden terhadap setiap unsur pelayanan. • n = Jumlah unsur pelayanan (maksudnya 9 unsur dalam SKM pemerintahan).	Kecamatan Kresek	Kecamatan Kresek
119	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Laporan Kecamatan Kronjo	Skor: $\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Nilai}}{n} \right) \times 25$ Penjelasan: • SKM (Nilai Rata-rata Responden) = Total nilai yang diberikan responden terhadap setiap unsur pelayanan. • n = Jumlah unsur pelayanan (maksudnya 9 unsur dalam SKM pemerintahan).	Kecamatan Kronjo	Kecamatan Kronjo
120	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	Nilai	mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Laporan Kecamatan Mauk	Skor: $\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Nilai}}{n} \right) \times 25$ Penjelasan: • SKM (Nilai Rata-rata Responden) = Total nilai yang diberikan responden terhadap setiap unsur pelayanan. • n = Jumlah unsur pelayanan (maksudnya 9 unsur dalam SKM pemerintahan).	Kecamatan Mauk	Kecamatan Mauk
121	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	Nilai	mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Laporan Kecamatan Rajeg	Skor: $\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Nilai}}{n} \right) \times 25$ Penjelasan: • SKM (Nilai Rata-rata Responden) = Total nilai yang diberikan responden terhadap setiap unsur pelayanan. • n = Jumlah unsur pelayanan (maksudnya 9 unsur dalam SKM pemerintahan).	Kecamatan Rajeg	Kecamatan Rajeg
122	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	Nilai	mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Laporan Kecamatan Sepatan	Skor: $\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Nilai}}{n} \right) \times 25$ Penjelasan: • SKM (Nilai Rata-rata Responden) = Total nilai yang diberikan responden terhadap setiap unsur pelayanan. • n = Jumlah unsur pelayanan (maksudnya 9 unsur dalam SKM pemerintahan).	Kecamatan Sepatan	Kecamatan Sepatan
123	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	Nilai	mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Laporan Kecamatan Teluknaga	Skor: $\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Nilai}}{n} \right) \times 25$ Penjelasan: • SKM (Nilai Rata-rata Responden) = Total nilai yang diberikan responden terhadap setiap unsur pelayanan. • n = Jumlah unsur pelayanan (maksudnya 9 unsur dalam SKM pemerintahan).	Kecamatan Teluknaga	Kecamatan Teluknaga
124	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	Nilai	mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Laporan Kecamatan Cisoka	Skor: $\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Nilai}}{n} \right) \times 25$ Penjelasan: • SKM (Nilai Rata-rata Responden) = Total nilai yang diberikan responden terhadap setiap unsur pelayanan. • n = Jumlah unsur pelayanan (maksudnya 9 unsur dalam SKM pemerintahan).	Kecamatan Cisoka	Kecamatan Cisoka
125	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	Nilai	mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Laporan Kecamatan Pakuhaji	Skor: $\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Nilai}}{n} \right) \times 25$ Penjelasan: • SKM (Nilai Rata-rata Responden) = Total nilai yang diberikan responden terhadap setiap unsur pelayanan. • n = Jumlah unsur pelayanan (maksudnya 9 unsur dalam SKM pemerintahan).	Kecamatan Pakuhaji	Kecamatan Pakuhaji
126	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	Nilai	mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Laporan Kecamatan Kosambi	Skor: $\left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Nilai}}{n} \right) \times 25$ Penjelasan: • SKM (Nilai Rata-rata Responden) = Total nilai yang diberikan responden terhadap setiap unsur pelayanan. • n = Jumlah unsur pelayanan (maksudnya 9 unsur dalam SKM pemerintahan).	Kecamatan Kosambi	Kecamatan Kosambi

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Sumber Data	Formulasi (Rumus)	Penanggung Jawab Data	Unit Penanggung Jawab
127	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	Nilai	mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Laporan Kecamatan Pagedangan	Bentuk Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (NSKM): $NSKM = \left(\frac{\sum_{i=1}^n NHR_i}{n} \right) \times 25$ Penjelasan: NHR (Nilai Rata-rata Responden) = Total nilai yang diberikan responden terhadap setiap unsur pelayanan. n = Jumlah unsur pelayanan (biasanya 9 unsur dalam NSKM secara keseluruhan).	Kecamatan Pagedangan	Kecamatan Pagedangan
128	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	Nilai	mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Laporan Kecamatan Jambe	Bentuk Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (NSKM): $NSKM = \left(\frac{\sum_{i=1}^n NHR_i}{n} \right) \times 25$ Penjelasan: NHR (Nilai Rata-rata Responden) = Total nilai yang diberikan responden terhadap setiap unsur pelayanan. n = Jumlah unsur pelayanan (biasanya 9 unsur dalam NSKM secara keseluruhan).	Kecamatan Jambe	Kecamatan Jambe

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Sumber Data	Formulasi (Rumus)	Penanggung Jawab Data	Unit Penanggung Jawab
129	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	Nilai	mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Laporan Kecamatan Jayanti	Formula Nilai SKMW Negosiasi Masyarakat (SRM): $SRM = \left(\frac{\sum_{i=1}^n NHR}{n} \right) \times 25$ Pengertian: • NHR (Nilai Rate-rata Responden) = Total nilai yang diberikan responden terhadap setiap unsur pelayanan. • n = Jumlah unsur pelayanan (biasanya 9 unsur dalam SKM pemerintahan).	Kecamatan Jayanti	Kecamatan Jayanti
130	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	Nilai	mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Laporan Kecamatan Kemiri	Formula Nilai SKMW Negosiasi Masyarakat (SRM): $SRM = \left(\frac{\sum_{i=1}^n NHR}{n} \right) \times 25$ Pengertian: • NHR (Nilai Rate-rata Responden) = Total nilai yang diberikan responden terhadap setiap unsur pelayanan. • n = Jumlah unsur pelayanan (biasanya 9 unsur dalam SKM pemerintahan).	Kecamatan Kemiri	Kecamatan Kemiri
131	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	Nilai	mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Laporan Kecamatan Sukadiri	Formula Nilai SKMW Negosiasi Masyarakat (SRM): $SRM = \left(\frac{\sum_{i=1}^n NHR}{n} \right) \times 25$ Pengertian: • NHR (Nilai Rate-rata Responden) = Total nilai yang diberikan responden terhadap setiap unsur pelayanan. • n = Jumlah unsur pelayanan (biasanya 9 unsur dalam SKM pemerintahan).	Kecamatan Sukadiri	Kecamatan Sukadiri
132	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	Nilai	mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Laporan Kecamatan Cisauk	Formula Nilai SKMW Negosiasi Masyarakat (SRM): $SRM = \left(\frac{\sum_{i=1}^n NHR}{n} \right) \times 25$ Pengertian: • NHR (Nilai Rate-rata Responden) = Total nilai yang diberikan responden terhadap setiap unsur pelayanan. • n = Jumlah unsur pelayanan (biasanya 9 unsur dalam SKM pemerintahan).	Kecamatan Cisauk	Kecamatan Cisauk
133	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	Nilai	mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Laporan Kecamatan Sepatan Timur	Formula Nilai SKMW Negosiasi Masyarakat (SRM): $SRM = \left(\frac{\sum_{i=1}^n NHR}{n} \right) \times 25$ Pengertian: • NHR (Nilai Rate-rata Responden) = Total nilai yang diberikan responden terhadap setiap unsur pelayanan. • n = Jumlah unsur pelayanan (biasanya 9 unsur dalam SKM pemerintahan).	Kecamatan Sepatan Timur	Kecamatan Sepatan Timur
134	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	Nilai	mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Laporan Kecamatan Sindang Jaya	Formula Nilai SKMW Negosiasi Masyarakat (SRM): $SRM = \left(\frac{\sum_{i=1}^n NHR}{n} \right) \times 25$ Pengertian: • NHR (Nilai Rate-rata Responden) = Total nilai yang diberikan responden terhadap setiap unsur pelayanan. • n = Jumlah unsur pelayanan (biasanya 9 unsur dalam SKM pemerintahan).	Kecamatan Sindang Jaya	Kecamatan Sindang Jaya
135	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	Nilai	mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Laporan Kecamatan Kelapa Dua	Formula Nilai SKMW Negosiasi Masyarakat (SRM): $SRM = \left(\frac{\sum_{i=1}^n NHR}{n} \right) \times 25$ Pengertian: • NHR (Nilai Rate-rata Responden) = Total nilai yang diberikan responden terhadap setiap unsur pelayanan. • n = Jumlah unsur pelayanan (biasanya 9 unsur dalam SKM pemerintahan).	Kecamatan Kelapa Dua	Kecamatan Kelapa Dua
136	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	Nilai	mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Laporan Kecamatan Solear	Formula Nilai SKMW Negosiasi Masyarakat (SRM): $SRM = \left(\frac{\sum_{i=1}^n NHR}{n} \right) \times 25$ Pengertian: • NHR (Nilai Rate-rata Responden) = Total nilai yang diberikan responden terhadap setiap unsur pelayanan. • n = Jumlah unsur pelayanan (biasanya 9 unsur dalam SKM pemerintahan).	Kecamatan Solear	Kecamatan Solear
137	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	Nilai	mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Laporan Kecamatan Mekar Baru	Formula Nilai SKMW Negosiasi Masyarakat (SRM): $SRM = \left(\frac{\sum_{i=1}^n NHR}{n} \right) \times 25$ Pengertian: • NHR (Nilai Rate-rata Responden) = Total nilai yang diberikan responden terhadap setiap unsur pelayanan. • n = Jumlah unsur pelayanan (biasanya 9 unsur dalam SKM pemerintahan).	Kecamatan Mekar Baru	Kecamatan Mekar Baru
138	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	Nilai	mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Laporan Kecamatan Mekar Baru	Formula Nilai SKMW Negosiasi Masyarakat (SRM): $SRM = \left(\frac{\sum_{i=1}^n NHR}{n} \right) \times 25$ Pengertian: • NHR (Nilai Rate-rata Responden) = Total nilai yang diberikan responden terhadap setiap unsur pelayanan. • n = Jumlah unsur pelayanan (biasanya 9 unsur dalam SKM pemerintahan).	Kecamatan Sukamulya	Kecamatan Sukamulya
139	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	Nilai	mengetahui prosentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Laporan Kecamatan Gunung Kaler	Formula Nilai SKMW Negosiasi Masyarakat (SRM): $SRM = \left(\frac{\sum_{i=1}^n NHR}{n} \right) \times 25$ Pengertian: • NHR (Nilai Rate-rata Responden) = Total nilai yang diberikan responden terhadap setiap unsur pelayanan. • n = Jumlah unsur pelayanan (biasanya 9 unsur dalam SKM pemerintahan).	Kecamatan Gunung Kaler	Kecamatan Gunung Kaler

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

MOHAMMAD MAESYAL RASYID